

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan sampah telah menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan. Peningkatan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan urbanisasi yang pesat telah mengakibatkan pertumbuhan volume sampah yang signifikan (Lingga *et al.*, 2024). Kebijakan pengelolaan sampah perlu diarahkan keparadigma baru pengelolaan sampah ramahlingkungan sebagaimana yang diisyaratkan dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2020 tentang peraturan yang mengatur pengelolaan sampah spesifik. Sampah spesifik merupakan sampah yang perlu ditangani secara khusus karena karakteristik, volume, frekuensi, atau faktor lain. Hal ini sejalan dengan pendapat (Islami, 1995) yang mengatakan bahwa kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu.

Paradigma baru dalam pengelolaan sampah menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Konsep *Collaborative Governanced* dalam penanganan sampah telah berhasil diterapkan di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Kota Surabaya dengan program *Green and Clean*-nya dan Kota Malang dengan Bank Sampah Malang (Rahmawati, 2023). Keberhasilan program-program tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Mengingat target *Sustainable Development Goals* (SDGs) terkait pengelolaan sampah yang harus dicapai pada tahun 2030. Kolaborasi efektif antara pemerintah kelurahan dan masyarakat menjadi kunci dalam mencapai target pengurangan timbulan sampah dan peningkatan daur ulang sampah sesuai dengan indikator SDGs (Ariyanti dan Pradana, 2024). Program penanganan sampah di Kelurahan Kuanino memiliki potensi untuk menjadi model percontohan bagi kelurahan lain di Kota Kupang. Keberhasilan program ini tidak hanya akan berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan, tetapi juga dapat mendorong terbentuknya pola kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan.

Tantangan global perubahan iklim juga menjadikan penanganan sampah sebagai isu strategis yang memerlukan pendekatan kolaboratif. Sampah yang tidak dikelola dengan baik berkontribusi pada emisi gas rumah kaca melalui pembusukan sampah organik dan pembakaran sampah. Oleh karena itu, pengembangan model kolaborasi yang efektif dalam penanganan sampah menjadi bagian integral dari upaya mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal

Produksi sampah berkorelasi positif dengan jumlah penduduk serta aktivitas perdagangan di suatu daerah. Kota Kupang, sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, permasalahan sampah menjadi semakin kompleks seiring dengan perkembangan kota dan penambahan penduduk yang terus meningkat (Sudrajat *et al.*, 2022). Kota Kupang dengan wilayah seluas 180,27 km persegi. Tahun 2019 telah dihuni oleh penduduk sebanyak 423,800 jiwa dengan kepadatan 2.350 jiwa per-km persegi (BPS Kota Kupang, 2020).

Rekomendasi hasil-hasil penelitian tentang sampah dan permasalahannya di Kota Kupang (Balitbangda Kota Kupang 2010 dan Balitbangda Kota Kupang, 2020) mengisyaratkan bahwa pengelolaan sampah harus beralih ke konsep pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dengan mempraktekkan konsep 3R (*reuse, reduce, recycle*) dimana pihak swasta dan masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah 3R.

Penelitian terdahulu tentang pengelolaan sampah di Kota Kupang lebih banyak berfokus pada aspek teknis dan infrastruktur, seperti yang dilakukan oleh (Alifvia, 2024). Sementara itu, kajian tentang aspek kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah masih terbatas, terutama dalam konteks kelurahan sebagai unit terkecil pemerintahan. Hal ini menunjukkan perlunya kajian komprehensif tentang model kolaborasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam penanganan sampah. Aspek-aspek seperti mekanisme koordinasi, pembagian peran dan tanggung jawab, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kolaborasi perlu diteliti lebih lanjut untuk mengembangkan model pengelolaan sampah yang berkelanjutan (Fatristya, 2024).

Kelurahan Kuanino, sebagai salah satu wilayah administratif di Kota Kupang, menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Kupang menunjukkan bahwa produksi sampah di Kelurahan Kuanino mencapai rata-rata 3,5 ton per hari pada tahun 2023 (Dinas Lingkungan Hidup, 2023). Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya infrastruktur pengelolaan sampah dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah dari sumbernya.

Upaya penanganan sampah yang dilakukan secara konvensional oleh pemerintah kelurahan tanpa melibatkan partisipasi aktif masyarakat terbukti tidak efektif dalam mengatasi permasalahan sampah (Khoiriyah, 2021). Pendekatan top-down yang selama ini diterapkan cenderung mengabaikan potensi dan peran masyarakat sebagai produsen sampah sekaligus aktor kunci dalam pengelolaannya. Hal ini mengakibatkan program-program penanganan sampah yang dijalankan tidak berkelanjutan dan tidak mencapai hasil yang optimal.

Di Kelurahan Kuanino, inisiatif kolaborasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam penanganan sampah mulai dirintis pada awal tahun 2024. Program ini mencakup pembentukan bank sampah, edukasi pemilahan sampah, dan pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas (Sayrani dan Tamunu, 2020). Namun, implementasi program ini masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang perlu dikaji secara komprehensif.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi program kolaboratif adalah koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan. Perbedaan persepsi, kepentingan, dan kapasitas antara pemerintah kelurahan dan masyarakat seringkali menghambat efektivitas kolaborasi (Lailin, 2024). Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun teknis, juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program penanganan sampah yang berkelanjutan.

Aspek sosial budaya masyarakat Kelurahan Kuanino yang beragam juga mempengaruhi tingkat partisipasi dalam program penanganan sampah. Kebiasaan membuang sampah sembarangan yang masih mengakar di sebagian masyarakat, serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik,

menjadi tantangan tersendiri dalam mengembangkan kolaborasi yang efektif (Nenobais, 2021). Di sisi lain, potensi ekonomi dari pengelolaan sampah yang baik belum dimanfaatkan secara optimal di Kelurahan Kuanino. Program bank sampah yang telah diinisiasi memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi unit usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Alifvia, 2024).

Uraian yang telah dituangkan diatas membuat penulis termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul **'Kolaborasi Pemerintah Kelurahan Dan Masyarakat Dalam Penanganan Sampah Di Kelurahan Kuanino Kota Kupang'**.

1.2. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini, masalah yang akan dikaji adalah :

Bagaimana bentuk kolaborasi antara pemerintah Kelurahan Kuanino dan masyarakat dalam penanganan sampah?

1.3. Tujuan

Menganalisis dan mendeskripsikan pola kolaborasi antara pemerintah Kelurahan Kuanino dan masyarakat dalam penanganan sampah.

1.4. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan konsep tentang governansi kolaboratif, khususnya dalam konteks pengelolaan lingkungan di tingkat kelurahan. Hasil penelitian dapat memperkaya literatur tentang kolaborasi pemerintah-masyarakat dalam penanganan sampah perkotaan, serta memberikan perspektif baru dalam memahami dinamika hubungan antara pemerintah lokal dan masyarakat. Temuan penelitian juga dapat menjadi referensi

akademis untuk pengembangan model-model kolaborasi dalam pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kelurahan Kuanino

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk perbaikan dan pengembangan program penanganan sampah berbasis kolaborasi.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam penanganan sampah, serta mendorong partisipasi aktif dalam program-program pengelolaan sampah.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengembangkan kebijakan dan program penanganan sampah yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

d. Bagi Kelurahan Lain

Hasil penelitian ini dapat menjadi model pembelajaran dalam mengembangkan program penanganan sampah berbasis kolaborasi.